



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2017

BEKRAF. Klasifikasi Arsip.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
6. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.
- (2) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI
KREATIF

KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

A. FUNGSI FASILITATIF

HM. HUBUNGAN MASYARAKAT (Komunikasi Publik)

01 Penerangan dan Publikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerangan kepada masyarakat melalui kegiatan: wawancara, wartawan, konferensi pers/*press realese*, media masa (Televisi, Radio, Surat Kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa dan media sosial, termasuk layanan informasi publik.

02 Dengar pendapat/*hearing* DPR

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/*hearing* dengan DPR.

03 Dokumen *Hosting*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan web site, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, jaringan informasi dan dokumentasi.

04 Hubungan Media Massa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan media massa (Televisi, Radio, Surat Kabar).

05 Bakohumas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/Bakohumas) baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.

06 Dokumentasi dan Penerbitan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan shooting) dan penerbitan bulletin/majalah /jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.

07 Ucapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa dan ucapan permohonan maaf.

08 Pengelolaan *Website*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan *website*.

HK. HUKUM

01 Program Legislasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program legislasi nasional.

02 Program Regulasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program regulasi Badan Ekonomi Kreatif.

03 Produk Hukum

03.01 Produk Hukum yang bersifat Pengaturan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur diantaranya Peraturan perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Operasional Standar, Surat Edaran mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.

03.02 Produk Hukum yang bersifat Penetapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), sejak perencanaan penyusunan naskah hingga penandatanganan.

04 Perjanjian

04.01 Kerjasama Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.

04.02 Kerjasama Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerja sama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama diantaranya: traktat, letter of intent, konvensi, perjanjian multilateral/regional.

05 Advokasi Hukum

05.01 Advokasi Hukum Kasus Perdata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang ekonomi kreatif.

05.02 Advokasi Hukum Kasus Pidana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang ekonomi kreatif.

05.03 Advokasi Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum Tata Usaha Negara (TUN) di bidang ekonomi kreatif.

06 Telaah Hukum

06.01 Telaah Hukum Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal Badan Ekonomi Kreatif.

06.02 Telaah Hukum Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal Badan Ekonomi Kreatif.

06.03 Telaah Perjanjian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan kontrak, perjanjian, dan kerjasama.

06.04 Telaah Akta

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan akta, dan berita acara.

06.05 Pertimbangan Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian Pertimbangan Hukum yang diminta oleh masyarakat.

07 Sosialisasi Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.

08 Dokumentasi dan Publikasi Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan dan penyebaran informasi hukum.

KP. KEPEGAWAIAN

01 Formasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan formasi.

01.01 Pegawai Negeri Sipil

01.02 Non Pegawai Negeri Sipil/P3K

02 Pengadaan Pegawai

02.01 Penerimaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan.

02.02 Pengangkatan CPNS dan PNS

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.

02.03 Prajabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan.

02.04 Penempatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan CPNS dan PNS di unit-unit kerja.

- 03 Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
 - 03.01 Penerimaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan.
 - 03.02 Pengangkatan P3K

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan P3K, pengangkatan P3K mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.
 - 03.03 Penempatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan P3K di unit-unit kerja.
- 04 Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan
 - 04.01 Ujian Penyesuaian Ijazah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS.
 - 04.02 Ujian Dinas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi PNS.
 - 04.03 Ujian Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk promosi jabatan.
- 05 Mutasi
 - 05.01 Kenaikan Pangkat/Golongan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan pegawai.
 - 05.02 Kenaikan Gaji Berkala

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai.
 - 05.03 Penyesuaian Masa Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.
 - 05.04 Penyesuaian Tunjangan Keluarga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
 - 05.05 Promosi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan.

- 05.06 Rotasi Kerja
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas.
- 05.07 Alih Tugas
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan.
- 06 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
 - 06.01 Pengangkatan Jabatan
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk di dalamnya pelantikan.
 - 06.02 Pemberhentian Jabatan
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural maupun fungsional.
- 07 Pendelegasian Wewenang
 - 07.01 Pelaksana Tugas (Plt)
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.
 - 07.02 Pelaksana Harian (Plh)
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh) dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).
- 08 Pendidikan Pegawai
 - 08.01 Program Diploma
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
 - 08.02 Program Sarjana
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

- 08.03 Program Pasca Sarjana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
- 08.04 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan diklat penjenjangan pegawai dari tingkat jabatan pimpinan tinggi madya, pratama, administrator dan pengawas.
- 08.05 Kursus/Diklat Fungsional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat fungsional baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
- 08.06 Kursus/ Diklat Teknis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat teknis baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi.
- 09 Administrasi Pegawai
 - 09.01 Data/keterangan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.
 - 09.02 Kartu Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.
 - 09.03 Karis/Karsu
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).
 - 09.04 Kartu Taspen
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.
 - 09.05 Kartu Jaminan/Asuransi Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Jaminan/Asuransi Kesehatan.
 - 09.06 Tanda Jasa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai Badan Ekonomi Kreatif.

10 Pembinaan Pegawai

10.01 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

10.02 SKP (Satuan Kinerja Pegawai)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.

10.03 Pembinaan Mental

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai diantaranya ceramah keagamaan, outbound, dll.

10.04 Hukuman Disiplin

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi teguran lisan/tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan/penurunan pangkat/golongan dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai CPNS, PNS, dan P3K.

11 Pembinaan Jabatan Fungsional

11.01 Jabatan Fungsional Tertentu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional tertentu, sejak usulan pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.

11.02 Jabatan Fungsional Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional umum, sejak usulan pengangkatan, penilaian dan pemberian tunjangan jabatan.

11.03 Jabatan Fungsional Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, sejak usulan pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.

12 Kesejahteraan Pegawai

12.01 Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan pegawai dan *general check up* pegawai.

- 12.02 Cuti
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara.
- 12.03 Rekreasi / Kesenian / Olah Raga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian dan olah raga.
- 12.04 Bantuan Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya.
- 12.05 Perumahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Badan Ekonomi Kreatif.
- 13 Pemberhentian Pegawai
 - 13.01 Dengan Hormat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk didalamnya pensiun/duda/janda/anak dan Taspen.
 - 13.02 Tidak Dengan Hormat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya SK pemberhentian.
- 14 Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai.
- 15 Berkas Perseorangan Pegawai (Personal File)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai (personal file) mulai dari lamaran kerja sampai dengan pensiun.

16 Organisasi Non Kedinasan

16.01 KORPRI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Badan Ekonomi Kreatif.

16.02 Dharma Wanita

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Badan Ekonomi Kreatif.

16.03 Koperasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Badan Ekonomi Kreatif.

16.04 Lain-lain

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.

17 Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang ekonomi kreatif.

OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

01 Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi dan perumusan organisasi.

02 Uraian Tugas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas masing-masing unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum.

03 Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan dan beban kerja.

04 Mekanisme Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi.

05 Ketatalaksanaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan

antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional.

PR. PERENCANAAN

01 Usulan Perencanaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.

02 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

02.01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

02.02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

03 Rencana Kerja Tahunan

03.01 Rencana Kerja Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas dan Rakorbangpus.

03.02 Penetapan Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif dengan Menteri PAN dan RB.

04 Penyusunan Rencana Anggaran

04.01 Penyusunan Rencana Anggaran Badan Ekonomi Kreatif

Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran Badan Ekonomi Kreatif seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP, Standar Biaya Khusus/SBK), ADIK (Aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerja), KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah).

04.02 Revisi Dokumen Anggaran

Naskah-naskah yang berhubungan dengan revisi /perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA, PO.

05 Laporan

05.01 Laporan Berkala

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan Triwulan, laporan Tahunan) Badan Ekonomi Kreatif.

05.02 Laporan Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: Pidato Presiden, rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

05.03 Progress Report

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).

05.04 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.

05.05 Evaluasi Kegiatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.

05.06 Bimtek

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis, aplikasi e-Monev, dll.

05.07 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk reviuinya.

KU. KEUANGAN

01 Pelaksanaan Anggaran

01.01 DIPA/POK

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), maupun revisi DIPA/POK.

01.02 RAB

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan Rencana Anggaran Belanja.

01.03 Penggajian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.

01.04 Pengeluaran Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), SSP-TUP (Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Juklak/mekanisme pengelolaan APBN serta Bahan Nota Keuangan.

02 Pengelolaan Perbendaharaan

02.01 Perbendaharaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan.

02.02 KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat Keterangan untuk Mendapat Tunjangan Keluarga dan Surat Keterangan lainnya.

- 02.03 Kartu Pengawasan Kredit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran.
- 02.04 Pajak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).
- 02.05 Penerimaan Non Pajak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penysetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.
- 02.06 Pengembalian Belanja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, barang, modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
- 02.07 Berita Acara Pemeriksaan Kas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
- 02.08 Verifikasi Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.
- 02.09 Pembukuan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi anggaran.
- 03 Perhitungan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa: Laporan Keuangan, LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
- 04 Ketatausahaan Keuangan
- 04.01 Keterangan Penghasilan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.

- 04.02 SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran).
- 04.03 Permohonan Pinjaman
Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman.
- 04.04 Iuran Keanggotaan Organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi baik tingkat nasional maupun internasional mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai laporan.

TU. KETATAUSAHAAN

01 Persuratan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahannya, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/ barang cetakan.

01.01 Pengurusan Surat Masuk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk.

01.02 Pengurusan Surat Keluar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar.

02 Penggandaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

03 Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kearsipan dinamis di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

03.01 Pembinaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi penilaian angka kredit arsiparis tingkat instansi, lomba tertib arsip, penilaian arsiparis berprestasi dan bimbingan teknis.

03.02 Penyusunan Sistem

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi tata naskah dinas, pola klasifikasi arsip, JRA, klasifikasi keamanan dan akses arsip, juklak, juknis kearsipan lainnya.

03.03 Pemindahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip.

03.04 Pemusnahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip.

03.05 Penyerahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip.

04 Rapat/Rakor/Rakernis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat, baik rapat pimpinan, rapat koordinasi maupun rapat kerja teknis internal Badan Ekonomi Kreatif, termasuk di dalamnya notulen dan hasil pembahasannya.

05 Keprotokolan

05.01 Upacara/Acara Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.

05.02 Kunjungan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat.

05.03 Agenda Pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan.

PL. PERLENGKAPAN

01 Analisa Kebutuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja.

- 02 Tata Ruang
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor.
- 03 Daftar Perkenalan Mampu
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Badan Ekonomi Kreatif.
- 04 Pengadaan
 - 04.01 Pengadaan Swakelola
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Swakelola pengadaan barang dan jasa.
 - 04.02 Pengadaan Melalui Penyedia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.
 - 04.03 Tanah dan Bangunan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan asset/kekayaan (sertifikat, IMB), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
 - 04.04 Kendaraan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (BPKP, STNK) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
 - 04.05 Instalasi/Jaringan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
- 05 Penyimpanan/Pergudangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang dari gudang.
- 06 Distribusi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang untuk kepentingan intern maupun ekstern.
- 07 Pemeliharaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/ *service* kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.

08 Inventarisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang milik negara (BMN) dan hibah di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif., termasuk Buku Inventaris.

09 Penghapusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk Berita Acaranya dan laporan kehilangan barang.

RT. KERUMAHTANGGAAN

01 Perjalanan Dinas Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan passport, visa dan tiket pesawat.

02 Fasilitas

02.01 Kendaraan Dinas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas.

02.02 Ruang Rapat/Konsumsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.

02.03 Telekomunikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).

03 Pengamanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Badan Ekonomi Kreatif dan pengaturan perparkiran termasuk kartu parkir.

PN. PENGAWASAN

01 Audit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit pengelolaan keuangan, operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan

tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

02 Reviu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

03 Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

04 Pengaduan Masyarakat

04.01 Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang datang dari internal Badan Ekonomi Kreatif sampai dengan laporan penyelesaiannya.

04.02 Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal Badan Ekonomi Kreatif sampai dengan laporan penyelesaiannya.

04.03 Pengawasan Melekat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas.

05 Laporan Hasil Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Badan Ekonomi Kreatif semesteran dan tahunan baik yang disampaikan ke Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan UKP4 serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

06 Pemantauan/Pendampingan Kegiatan Satker

06.01 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan monitoring

pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

06.02 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti; Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang/uang, SK tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR.

06.03 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) Intern dan Ekstern

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan (LHP) BPK RI, atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan pelaporan.

06.04 Penerapan *Early Warning System*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.

06.05 Pemantauan Disiplin Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sampai dengan laporan.

07 Kegiatan Pengawasan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, diklat pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam Forum Bersama Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan forum komunikasi lainnya.

B. FUNGSI SUBSTANTIF

RE. RISET, EDUKASI DAN PENGEMBANGAN

01 Program

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program riset, edukasi dan pengembangan.

02 Riset dan Pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan riset dan pengembangan (berbagai sektor) sejak pengumpulan data, pengolahan, penyusunan instrumen riset, metodologi, analisis, hingga hasil riset.

03 Pencetakan Hasil Riset

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencetakan hasil riset dan pengembangan (berbagai sektor).

04 Layanan Informasi Hasil Riset

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan informasi hasil riset dan pengembangan (berbagai sektor).

05 Edukasi Ekraf

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan edukasi Ekraf (berbagai sektor).

06 Bimbingan Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis riset, edukasi dan pengembangan Ekraf (berbagai sektor).

07 Supervisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi riset, edukasi dan pengembangan Ekraf (berbagai sektor).

08 Pembinaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pemberian dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan Ekraf.

AP. AKSES PERMODALAN

01 Program

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program akses permodalan.

02 Akses Perbankan

02.01 Konvensional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akses perbankan konvensional.

02.02 Perbankan Syariah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akses perbankan syariah.

- 03 Akses Non Perbankan
 - 03.01 Dana Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akses non perbankan.
 - 03.02 Modal Ventura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akses non perbankan.
- 04 Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyiapan kebijakan akses permodalan berbagai sektor.
- 05 Bimbingan Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis akses permodalan sejak persiapan hingga laporan.
- 06 Supervisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi akses permodalan sejak persiapan hingga laporan.
- 07 Pembinaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dalam rangka akses permodalan.
- 08 Komunikasi Akses Permodalan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan komunikasi dalam rangka akses permodalan dengan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- 09 Evaluasi dan Laporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan laporan, termasuk monitoring, sejak persiapan, pelaksanaan dan laporan.

IF. INFRASTRUKTUR

- 01 Fasilitasi Infrastruktur Fisik
 - 01.01 Pengembangan Kota Kreatif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi pengembangan kota kreatif.
 - 01.02 Pengembangan Desa Kreatif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi pengembangan desa kreatif.

01.03 Pengembangan Pusat Kreatif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi pengembangan pusat kreatif.

01.04 Pengembangan Inkubator Bisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi pengembangan inkubator bisnis.

01.05 Infrastruktur Sub Sektor Ekonomi Kreatif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi infrastruktur Sub sektor ekonomi kreatif.

02 Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

02.01 Perancangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi infrastruktur perancangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

02.02 Manajemen Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi infrastruktur manajemen pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

PM. PEMASARAN

01 Pengembangan Pasar Segmen Retail

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang pengembangan pasar segmen retail.

01.01 Branding

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan strategi branding dan peningkatan kualitas produk dan jasa kreatif.

01.02 Promosi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dalam rangka pengembangan pasar.

01.03 Publikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi dalam rangka pengembangan pasar.

02 Pengembangan Pasar Bisnis Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang pengembangan pasar segmen bisnis dan pemerintah.

02.01 Branding

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan strategi branding dan peningkatan kualitas produk dan jasa kreatif.

02.02 Promosi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dalam rangka pengembangan pasar.

02.03 Publikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi dalam rangka pengembangan pasar.

03 Bimtek

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis pengembangan pasar (berbagai sektor).

04 Supervisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi pengembangan pasar (berbagai sektor).

HR. FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN REGULASI

01 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

01.01 Advokasi HKI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, bidang advokasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

01.02 Pengelolaan HKI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, bimtek dan supervisi,

pembinaan dan pemberian dukungan, bidang pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

02 Harmonisasi Regulasi dan Standarisasi

02.01 Harmonisasi Regulasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, bidang harmonisasi regulasi.

02.02 Standarisasi dan Sertifikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, bidang standarisasi dan Sertifikasi.

HL. Hubungan Antarlembaga dan Wilayah

01 Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri

01.01 Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, kerjasama, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang Hubungan Antarlembaga Pemerintah di dalam negeri.

01.02 Non-pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, kerjasama, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang Hubungan Antarlembaga Non pemerintah di dalam negeri.

02 Hubungan Antarlembaga Luar Negeri

02.01 Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, kerjasama, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang Hubungan Antarlembaga pemerintah di luar negeri.

02.02 Non-pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, kerjasama bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang Hubungan Antarlembaga Non pemerintah di luar negeri.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF